

NAMA PROYEK:

Mendorong Inklusi Pelayanan Publik dan Akses Ekonomi bagi Komunitas Orang Rimba dan Talang Mamak

LATAR BELAKANG

Orang Rimba dan Talang Mamak adalah dua komunitas adat minoritas di Provinsi Jambi. Secara tradisional, kedua suku ini hidup di kawasan hutan yang menjadi identitas budaya sekaligus sumber penghidupan mereka. Hutan bagi mereka tidak hanya berfungsi sebagai tempat mencari nafkah, tetapi juga erat kaitannya dengan sistem nilai, ritual, pengobatan, dan kehidupan spiritual.

Namun, kebijakan konversi hutan telah menyebabkan hilangnya hampir seluruh kawasan hutan yang menjadi ruang hidup Orang Rimba dan Talang Mamak. Lahan tersebut telah berubah menjadi area perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), pertambangan, dan kawasan transmigrasi. Akibatnya, kedua komunitas ini semakin rentan, termarginalisasi, dan hidup dalam kemiskinan karena kehilangan sumber penghidupan utamanya.

Orang Rimba dan Talang Mamak sebelumnya sudah mengalami eksklusi sosial karena keterpencilan geografis, sistem hidup yang berbeda, diskriminasi, minimnya informasi, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka. Hilangnya hutan memperparah kondisi tersebut. Eksklusi sosial mendorong mereka masuk ke dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus, menyebabkan rendahnya status sosial, pendapatan, dan akses terhadap pelayanan dasar, serta minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dampaknya, Orang Rimba dan Talang Mamak tidak mampu beradaptasi untuk ikut serta dalam sistem kehidupan umum. Sistem pembangunan yang ada pun sulit menjangkau mereka. Kondisi ini paling berdampak pada kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan dan anak-anak sangat tergantung pada alam. Budaya tradisional membatasi mobilitas perempuan dan anak, sementara laki-laki diberi kebebasan untuk bepergian hingga ke desa atau kota. Akibatnya, laki-laki lebih mudah mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan informasi.

Persoalan gender dalam layanan dasar masih dipahami sebatas akses perempuan terhadap layanan, tanpa memperhatikan peran mereka sebagai penyedia atau pelaksana layanan publik. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan juga menyebabkan praktik pernikahan anak, dengan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, yang berkontribusi terhadap tingginya risiko kematian ibu dan anak. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2020 mencatat:

Kabupaten Tebo: 11 kasus kematian ibu, 40 kasus kematian neonatal, 52 kematian bayi, dan 53 kematian balita.

Kabupaten Merangin: 5 kasus kematian ibu, 30 kasus kematian neonatal, 40 kematian bayi, dan 41 kematian balita.

Anak-anak Orang Rimba dan Talang Mamak juga kesulitan memperoleh akta kelahiran karena orang tua mereka tidak memiliki surat nikah atau menikah di usia dini. Hal ini menghambat proses pembuatan Kartu Keluarga dan menjadi kendala dalam mengakses pendidikan formal. Anak perempuan lebih rentan

tidak mengenyam pendidikan dibanding anak laki-laki karena faktor budaya. Selain itu, ditemukan kasus stunting pada anak-anak di kedua komunitas tersebut.

Terkait disabilitas, terdapat sembilan penyandang disabilitas: enam jiwa di Orang Rimba Pamenang dan tiga jiwa di Talang Mamak Simarantihan. Disabilitas menjadi penyebab sekaligus akibat dari kemiskinan. Penyandang disabilitas sering kali dipinggirkan dalam kebijakan pembangunan dan dianggap sebagai beban. Kebijakan dan peraturan yang ada masih cenderung bersifat karitatif ketimbang berbasis hak asasi manusia.

Program yang fokus pada pemenuhan hak dasar dan bantuan sosial untuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sangat penting, khususnya di wilayah Orang Rimba (Merangin dan Tebo) dan Talang Mamak (Tebo).

Saat ini, kedua komunitas ini masih termarginalisasi dari hak-hak dasar dan partisipasi publik yang semestinya mereka nikmati sebagai warga negara. Konsep kewarganegaraan inklusif memiliki empat prinsip utama: (1) Keanggotaan dalam komunitas, (2) Identitas hukum/legal, (3) Pemenuhan hak, dan (4) Partisipasi. Keempat prinsip ini belum sepenuhnya terpenuhi pada komunitas Orang Rimba dan Talang Mamak, karena stigma dari masyarakat umum dan pemangku kebijakan. Identitas adat mereka sering menjadi alasan terpinggirkannya mereka dari akses layanan publik.

TUJUAN

Tujuan Umum: Terwujudnya penerimaan sosial terhadap komunitas adat minoritas melalui perbaikan layanan publik dan akses ekonomi yang sensitif terhadap isu GEDSI.

Tujuan Khusus: Perbaikan layanan publik untuk memenuhi hak-hak dasar kewarganegaraan Orang Rimba dan Talang Mamak, terutama bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

WILAYAH KERJA

- Kabupaten Tebo: Kecamatan Sumay (Desa Semambu dan Desa Suo Suo)
- Kabupaten Merangin: Kecamatan Pamenang (Desa Rejosari, Sialang, Pauh Menang, dan Pelakar Jaya)

FOKUS PROGRAM

- Pengarusutamaan GEDSI untuk peningkatan akses layanan dasar, perlindungan sosial, dan program pemerintah.
- Advokasi kebijakan untuk pemberdayaan perempuan adat dan kelompok rentan.
- Mendorong partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam forum diskusi publik, perencanaan pembangunan, serta partisipasi sosial dan kelembagaan desa.
- Pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komunitas.
- Advokasi perlindungan lahan penghidupan dan ketahanan pangan komunitas.
- Penguatan kapasitas dan kolaborasi multipihak (kader, instansi pemerintah, sektor swasta, CSO, komunitas muda, dan lainnya).

MITRA KERJA

- Pemprov Jambi, Pemkab Tebo dan Merangin
- UPTD PPA Merangin dan Tebo, UPTD Puskesmas Pamenang dan Sumay

- Pemerintah desa dampingan
- PT. LAJ dan PT. ABT di Tebo, PT. KDA di Merangin
- Aliansi Perempuan Merangin, Beranda Perempuan Jambi, GirlUp Siginjai
- Forum Tim Resolusi Konflik PT. LAJ – POKJA Orang Rimba
- Forum Kolaborasi Bukit Tiga Puluh
- Forum Kolaborasi Pemberdayaan SAD Provinsi Jambi
- Forum Guru dan Pendamping SAD Merangin
- Pendamping Misionaris di SAD Merangin
- Kader Komunitas Orang Rimba dan Talang Mamak

ANGGARAN

Tahun 2022: Rp500.000.000

Tahun 2023: Rp650.000.000

Tahun 2024: Rp860.200.000

Tahun 2025: Rp850.000.000

Total: Rp2.860.200.000

DURASI PROGRAM

Juli 2022 – Desember 2025

DOKUMEN TERKAIT